



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD TAUFIQ
2. Jabatan : KASI PEMANFAATAN ARSIP
3. NHK : 227716

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.635.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/75 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 425 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 52.500.000
3. Tanah Seluas 296 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/218 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 311.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR / 2DP N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2.0 G M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET SPIN 1.5 LTZ A/T Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.697.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 82.861.620**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 2.096.058.620

III. HUTANG Rp. 79.709.832



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.016.348.788

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **16 April 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.